

Keseimbangan Pasar Barang dalam Perpektif Ekonomi

Novi Susanti¹

¹STAI Yaptip Pasaman Barat

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 25, 2025

Revised January 30, 2025

Accepted February 15, 2025

Available online February 16, 2025

Kata Kunci:

keseimbangan pasar, ekonomi Islam, etika bisnis

Keywords:

market equilibrium, Islamic economics, business ethics



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Keseimbangan pasar barang dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Dalam perspektif ini, pasar tidak hanya dilihat sebagai mekanisme penyeimbang antara penawaran dan permintaan, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan menjaga kesejahteraan sosial. Artikel ini menjelaskan konsep keseimbangan pasar dalam Islam, yang berbeda dari sistem ekonomi konvensional dengan menekankan pada etika bisnis, larangan riba, gharar (spekulasi), serta praktik monopoli. Selain itu, intervensi pemerintah dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mencegah distorsi pasar dan melindungi hak-hak konsumen serta produsen. Studi ini juga membahas peran lembaga pengawasan seperti hisbah dalam menjaga integritas pasar. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana keseimbangan pasar barang diterapkan dalam kerangka ekonomi Islam, serta relevansinya dalam sistem ekonomi modern.

ABSTRACT

The equilibrium of the commodity market in Islamic economics is based on the principles of justice, transparency, and compliance with sharia law. In this perspective, the market is not only seen as a

balancing mechanism between supply and demand, but also as a means of ensuring a fair distribution of wealth and maintaining social welfare. This article explains the concept of market equilibrium in Islam, which differs from conventional economic systems by emphasizing business ethics, prohibition of usury, gharar (speculation), as well as monopoly practices. In addition, government intervention in Islamic economics aims to prevent market distortions and protect the rights of consumers as well as producers. The study also discusses the role of regulatory agencies such as the SEC in maintaining market integrity. Through this analysis, it is hoped to provide an in-depth understanding of how commodity market equilibrium is applied in the framework of Islamic economics, as well as its relevance in modern economic systems.

PENDAHULUAN

Dalam ekonomi konvensional, keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang atau jasa yang ditawarkan (supply) sama dengan jumlah yang diminta (demand) pada harga tertentu. Ini disebut sebagai harga keseimbangan (equilibrium price) dan jumlah keseimbangan (equilibrium quantity). Pada titik keseimbangan, tidak ada surplus (kelebihan penawaran) atau kekurangan (kelebihan permintaan), sehingga pasar dapat beroperasi secara efisien (Siddiqi, 2004).

Prinsip dasar ekonomi konvensional dalam keseimbangan pasar melibatkan mekanisme pasar bebas yang didorong oleh hukum penawaran dan permintaan. Kenaikan harga cenderung menurunkan permintaan dan meningkatkan penawaran, sementara penurunan harga cenderung meningkatkan permintaan dan menurunkan penawaran hingga tercapai keseimbangan. Ekonomi konvensional cenderung menekankan efisiensi pasar dan keseimbangan alokasi sumber daya, tanpa memperhatikan nilai-nilai moral atau sosial. Adapun perbeddaan dasar dengan perspektif Ekonomi Islam, yaitu

1. Prinsip Moral dan Etika: Dalam ekonomi Islam, keseimbangan pasar tidak hanya berfokus pada efisiensi dan interaksi penawaran-permintaan, tetapi juga pada keadilan sosial dan moralitas. Nilai-nilai seperti keadilan ('adl), kejujuran (sidq), dan tanggung jawab sosial sangat diperhitungkan dalam kegiatan ekonomi. Transaksi harus dilakukan dengan etika yang baik, menghindari manipulasi harga, eksploitasi, atau ketidakpastian (gharar).
2. Larangan Riba dan Spekulasi: Salah satu perbedaan paling mendasar adalah larangan riba (bunga) dan gharar (spekulasi) dalam transaksi pasar. Dalam ekonomi konvensional, bunga sering menjadi komponen penting dalam transaksi keuangan dan penentuan harga. Namun,

*Corresponding author

E-mail addresses: novisusanti080975@gmail.com

- ekonomi Islam melarang riba karena dianggap merugikan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, ekonomi Islam mengharamkan aktivitas spekulatif yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakstabilan pasar.
3. Peran Pemerintah dan Pengawasan Pasar: Ekonomi Islam memberikan ruang bagi pemerintah untuk berperan aktif dalam menjaga keseimbangan pasar, terutama untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat seperti monopoli, kartel, dan penimbunan barang. Pemerintah dapat mengintervensi pasar jika ada ketidakadilan, sementara dalam ekonomi konvensional, pasar bebas cenderung kurang diintervensi kecuali dalam situasi darurat.
 4. Distribusi Kekayaan: Keseimbangan pasar dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk alokasi sumber daya yang efisien, tetapi juga untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil. Sistem zakat, infaq, dan sedekah berfungsi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa keseimbangan pasar juga membawa kesejahteraan sosial yang lebih luas. Dalam ekonomi konvensional, distribusi kekayaan seringkali diserahkan kepada mekanisme pasar, yang bisa mengarah pada kesenjangan pendapatan yang lebih besar.
 5. Tujuan Pasar: Dalam ekonomi konvensional, tujuan utama pasar adalah efisiensi ekonomi dan keuntungan. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, tujuan pasar adalah masalah (kesejahteraan umum) yang mencakup keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pasar bukan hanya sarana untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk mencapai keadilan sosial dan keseimbangan antara hak dan kewajiban (Chapra, 1992).

Terdapat hakikat keseimbangan dalam Islam, yakni keseimbangan moral, keseimbangan sosial, dan keseimbangan ekonomi. Keseimbangan moral memiliki prinsip etika dan moral. Prinsip etika dan moral terdapat keadilan dan kejujuran dan larangan praktik tidak etis. Keadilan dan kejujuran Dalam Islam, keseimbangan moral berlandaskan prinsip keadilan ('adl) dan kejujuran (sidq). Keseimbangan pasar harus menjamin bahwa transaksi dilakukan dengan penuh integritas, tanpa penipuan, eksploitasi, atau ketidakadilan. Larangan praktik tidak etis dilarang dalam Islam dan dianggap tidak etis, seperti seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Prinsip moral ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Berikutnya tanggung jawab sosial kepedulian terhadap sesama menekankan kepedulian terhadap sesama dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi. Ini termasuk berperilaku adil dalam hubungan bisnis dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui zakat, infaq, dan sedekah. Eika perilaku diharapkan pelaku ekonomi diharapkan menjaga akhlak yang baik, seperti kesabaran, keramahan, dan hormat dalam semua interaksi bisnis (Ariff & Rosly, 2011).

Keseimbangan sosial mencakup keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Keadilan sosial mencakup distribusi yang adil dan kesetaraan peluang. Distribusi kekayaan yang adil merupakan keseimbangan sosial dalam Islam melibatkan upaya untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil. Sistem zakat dan kewajiban sosial lainnya berfungsi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa tidak ada individu yang tertinggal dalam ketidakberuntungan ekonomi. Kesetaraan peluang ialah pemberian kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, status sosial, atau jenis kelamin. Perlindungan terhadap kelompok rentan, yaitu perlindungan kerja dan perlindungan konsumen. Perlindungan kerja merupakan keseimbangan sosial juga mencakup perlindungan hak-hak pekerja, memastikan bahwa mereka menerima upah yang adil dan kondisi kerja yang layak. Perlindungan konsumen dilindungi dari praktik-praktik yang merugikan, seperti penipuan dan eksploitasi, melalui pengawasan syariah dan regulasi pasar (Hafidzi et al., 2021).

Keseimbangan ekonomi meliputi alokasi sumber daya yang efisien dan keberlanjutan dan kesejahteraan umum. Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan masyarakat menekankan pada kesejahteraan umum (masalah) sebagai tujuan akhir dari kegiatan ekonomi. Ini mencakup kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan, memastikan bahwa keuntungan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang tetapi berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan umum. Keseimbangan ekonomi dalam Islam juga melibatkan pertumbuhan yang berkelanjutan, yang berarti tidak hanya memprioritaskan keuntungan jangka pendek tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan (Purnomo, 2015).

Kurva IS (investment Saving) dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. Dalam ekonomi konvensional menggambarkan kombinasi antara tingkat suku bunga (interest rate) dan output nasional (gross domestic product, GDP) di mana pasar barang dan jasa berada dalam keseimbangan. Di titik-titik pada kurva IS, total investasi sama dengan total tabungan dalam perekonomian. Mekanisme dalam Kurva IS diturunkan dari keseimbangan pasar barang, di mana permintaan agregat (AD) sama dengan penawaran agregat (AS). Penurunan suku bunga cenderung mendorong investasi, yang pada gilirannya

meningkatkan output nasional. Sebaliknya, kenaikan suku bunga cenderung mengurangi investasi dan output. Terdapat pengaruh faktor eksternal, seperti perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan pajak. Perubahan dalam pengeluaran pemerintah atau pajak akan menggeser kurva IS. Misalnya, peningkatan pengeluaran pemerintah akan menggeser kurva IS ke kanan, menunjukkan peningkatan output pada tingkat suku bunga yang sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi dan tabungan, seperti perubahan dalam kepercayaan bisnis atau kebijakan fiskal, juga akan menggeser kurva IS (Zahratul Jannah & Rahma Dwi, 2024).

Konsep kurva IS dalam ekonomi Islam memiliki dasar yang sama dengan ekonomi konvensional, yaitu menunjukkan keseimbangan antara investasi dan tabungan dalam perekonomian. Namun, penerapan dan analisis kurva IS dalam ekonomi Islam dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah yang membedakannya dari pendekatan konvensional. Dalam ekonomi Islam, kurva IS akan dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah yang mempengaruhi keputusan investasi dan tabungan. Misalnya, larangan terhadap riba (bunga) dan spekulasi (gharar) mempengaruhi cara investasi dilakukan dan bagaimana tabungan dikelola. Suku bunga konvensional tidak berlaku karena riba dilarang. Sebagai gantinya, instrumen keuangan syariah seperti mudharabah (bagi hasil) dan murabaha (jual beli dengan margin keuntungan) digunakan. Hal ini mempengaruhi dinamika investasi dan tabungan. Investasi harus dilakukan dalam aktivitas yang halal (diperbolehkan) dan tidak mengandung unsur spekulasi. Ini mempengaruhi jenis proyek investasi yang muncul dan distribusi tabungan dalam perekonomian. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam juga akan mempengaruhi kurva IS, tetapi kebijakan tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah dan memperhatikan aspek keadilan sosial (Mahera & Jamal, 2024).

Sama seperti dalam ekonomi konvensional, peningkatan pengeluaran pemerintah dalam ekonomi Islam dapat menggeser kurva IS ke kanan. Namun, pengeluaran tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti tidak membiayai proyek yang dilarang atau tidak etis. Mekanisme tabungan dan investasi mungkin berbeda karena larangan riba dan ketidakpastian. Ini dapat mempengaruhi posisi dan kemiringan kurva IS jika dibandingkan dengan ekonomi konvensional (Nasution, 2018).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mereview sejumlah artikel yang diterbitkan di jurnal nasional. Teknik analisis dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah artikel yang relevan dengan judul penelitian ini. Teknik pengumpulan data dikumpulkan berdasarkan judul penelitian ini kemudian diperbandingkan hasil penelitiannya dan dijelaskan dalam hasil dan pembahasan di tulisan ini yang berisi bagaimana data dikumpulkan, sumber data dan cara analisis data (Argaheni, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis

Kurva IS (Investment-Saving) menunjukkan kombinasi antara tingkat suku bunga dan output nasional di mana pasar barang dan jasa berada dalam keseimbangan. Kurva ini mencerminkan keseimbangan antara total investasi dan tabungan dalam perekonomian.

Kurva LM biasanya merujuk pada hubungan antara tingkat suku bunga dan investasi dalam ekonomi. Namun, jika Anda merujuk pada kurva LM (Liquidity-Money), kurva ini menunjukkan keseimbangan antara permintaan uang dan penawaran uang dalam perekonomian, berhubungan dengan tingkat suku bunga dan output nasional.

Dalam model IS-LM (Investment-Saving, Liquidity-Money), keseimbangan jangka pendek dicapai di titik perpotongan antara kurva IS dan kurva LM. Di titik ini, pasar barang dan jasa serta pasar uang berada dalam keseimbangan. Ini berarti bahwa total permintaan barang dan jasa sama dengan total penawaran, dan jumlah uang yang diminta sama dengan jumlah uang yang ditawarkan pada tingkat suku bunga dan output tertentu (Wicaksono, 2019). Perubahan dalam kebijakan fiskal (pengeluaran pemerintah atau pajak) menggeser kurva IS. Peningkatan pengeluaran pemerintah atau pengurangan pajak akan menggeser kurva IS ke kanan, sementara penurunan pengeluaran pemerintah atau peningkatan pajak akan menggeser kurva IS ke kiri. Perubahan dalam kebijakan moneter (penawaran uang) menggeser kurva LM. Peningkatan penawaran uang akan menggeser kurva LM ke kanan, sedangkan pengurangan penawaran uang akan menggeser kurva LM ke kiri. Peningkatan pengeluaran pemerintah akan menggeser kurva IS ke kanan, meningkatkan output dan suku bunga dalam jangka pendek. Untuk menjaga keseimbangan di pasar uang, bank sentral mungkin perlu menyesuaikan penawaran uang.

Sama dengan ekonomi konvensional, kurva IS dalam ekonomi Islam menunjukkan keseimbangan antara investasi dan tabungan. Namun, keputusan investasi dan tabungan dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan gharar. Keseimbangan jangka pendek di ekonomi Islam dicapai di titik perpotongan antara kurva IS dan LM, sama seperti dalam model konvensional. Namun, instrumen

moneter dan kebijakan fiskal harus sesuai dengan prinsip syariah. Dalam ekonomi Islam, perubahan dalam pengeluaran pemerintah atau kebijakan fiskal yang sesuai dengan syariah akan mempengaruhi kurva IS. Misalnya, pengeluaran untuk proyek yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat akan menggeser kurva IS ke kanan. Perubahan dalam penawaran uang yang mematuhi prinsip syariah akan mempengaruhi kurva LM. Peningkatan pengeluaran untuk proyek yang mematuhi prinsip syariah akan menggeser kurva IS ke kanan, meningkatkan output dan suku bunga. Dalam hal ini, bank sentral mungkin perlu menyesuaikan penawaran uang dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah untuk menjaga keseimbangan di pasar uang. Di ekonomi Islam, instrumen moneter seperti sukuk (obligasi syariah) dan mekanisme bagi hasil menggantikan instrumen berbasis bunga. Ini mempengaruhi cara kurva LM berfungsi. Semua kebijakan fiskal dan moneter harus mematuhi prinsip syariah, yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah dan penawaran uang. Di ekonomi Islam, instrumen moneter seperti sukuk (obligasi syariah) dan mekanisme bagi hasil menggantikan instrumen berbasis bunga. Ini mempengaruhi cara kurva LM berfungsi. Semua kebijakan fiskal dan moneter harus mematuhi prinsip syariah, yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah dan penawaran uang (Aini, 2019).

Dalam ekonomi, keseimbangan pasar barang terjadi ketika total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian sama dengan total penawaran barang dan jasa. Pada titik keseimbangan ini, tidak ada dorongan untuk perubahan harga karena jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ekonomi Islam melarang praktik riba. Oleh karena itu, sistem keuangan Islam tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk mempengaruhi permintaan atau penawaran barang. Ini mempengaruhi bagaimana investasi dilakukan dan bagaimana tabungan dikelola dalam perekonomian. Transaksi dalam pasar barang harus bebas dari ketidakpastian dan perjudian. Semua transaksi harus jelas, transparan, dan adil. Ini memastikan bahwa harga barang dan jasa mencerminkan nilai yang sebenarnya tanpa spekulasi yang merugikan (Miskiyah et al., 2022).

Keseimbangan pasar barang dalam ekonomi Islam diatur oleh prinsip syariah. Permintaan barang dan jasa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebutuhan konsumen dan pendapatan yang diperoleh secara halal. Penawaran barang dan jasa dipengaruhi oleh biaya produksi dan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha. Harga barang dan jasa ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran, namun harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, harga tidak boleh dipengaruhi oleh praktik monopoli atau penipuan. Pemerintah dapat mempengaruhi keseimbangan pasar barang melalui kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah dan pajak. Dalam ekonomi Islam, pengeluaran pemerintah harus digunakan untuk proyek yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Meskipun instrumen moneter berbasis bunga tidak digunakan, bank sentral dapat mempengaruhi ekonomi melalui mekanisme syariah seperti sukuk (obligasi syariah) dan kebijakan likuiditas. Ini dapat mempengaruhi tingkat investasi dan konsumsi, serta keseimbangan pasar barang.

Faktor eksternal seperti globalisasi dan perdagangan internasional juga mempengaruhi keseimbangan pasar barang. Ekonomi Islam mendorong perdagangan yang adil dan transparan serta mematuhi prinsip syariah dalam perdagangan internasional. Dalam pasar pangan, keseimbangan terjadi ketika jumlah pangan yang ditawarkan oleh petani sama dengan jumlah yang diminta oleh konsumen. Kebijakan pemerintah dalam mengatur harga pangan, memastikan ketersediaan pangan, dan melaksanakan zakat pangan dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Kebijakan dalam ekonomi Islam akan memastikan bahwa harga pangan adil dan tidak ada penipuan dalam transaksi. Ini termasuk pengaturan harga yang adil dan melarang praktik penimbunan atau manipulasi harga. Dalam pasar properti, keseimbangan terjadi ketika penawaran rumah dan properti sama dengan permintaan dari pembeli. Keseimbangan ini dipengaruhi oleh biaya konstruksi, pendapatan masyarakat, dan ketersediaan pembiayaan yang sesuai syariah. Pembiayaan properti dalam ekonomi Islam dilakukan melalui mekanisme seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) atau ijarah (sewa), yang mematuhi prinsip syariah dan mempengaruhi keseimbangan pasar properti.

Diskusi

Studi kasus keseimbangan pasar dan barang dalam ekonomi Islam berdasarkan konteks historis dikenal sebagai pasar Qaynuqa dan pasar lainnya, adalah pusat perdagangan di kota Madinah pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Pasar ini memainkan peran penting dalam distribusi barang dan jasa di masyarakat Muslim awal. Rasulullah SAW menekankan pentingnya penetapan harga yang adil dan melarang praktik penipuan. Beliau mendorong para pedagang untuk menjaga transparansi dalam transaksi dan menghindari praktik-praktik yang tidak adil seperti monopoli dan penimbunan barang. Praktik penipuan dan ketidakpastian dalam transaksi dilarang. Rasulullah SAW mengatur pasar dengan menghindari penipuan dalam timbangan dan ukuran serta memastikan bahwa harga barang sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Rasulullah SAW juga memperhatikan kepedulian sosial dengan memastikan bahwa kebutuhan pokok seperti makanan dan barang penting tersedia dengan harga yang wajar. Beliau mengimplementasikan kebijakan yang mencegah eksploitasi dan memastikan aksesibilitas

barang bagi semua kalangan masyarakat. Beliau sering terlibat langsung dalam memantau praktik perdagangan dan menyelesaikan sengketa yang timbul, memastikan bahwa prinsip keadilan dan etika dipatuhi di pasar.

Contoh negara yang menerapkan prinsip Ekonomi Islam, yaitu Arab Saudi menerapkan berbagai regulasi pasar yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk pengawasan ketat terhadap harga barang pokok dan memastikan bahwa transaksi komersial mematuhi hukum syariah. Negara ini juga memiliki sistem yang kuat untuk mengelola zakat dan infaq, yang mendukung distribusi kekayaan Indonesia memiliki lembaga seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengawasi kepatuhan transaksi keuangan dan perdagangan terhadap prinsip syariah. dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Berikutnya negara Indonesia. Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai program sosial berbasis syariah, termasuk zakat produktif dan bantuan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan. Malaysia juga menerapkan prinsip Ekonomi Islam. Malaysia memiliki kerangka kerja ekonomi syariah yang mencakup peraturan untuk pasar keuangan, perdagangan, dan investasi. Negara ini memastikan bahwa pasar beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mendorong transparansi dalam transaksi. Malaysia juga melaksanakan program pengembangan sosial yang mendukung pelatihan keterampilan dan usaha kecil, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Negara-negara yang menerapkan ekonomi Islam memiliki lembaga pengawas syariah yang bertugas memastikan bahwa transaksi ekonomi, termasuk penetapan harga dan peraturan pasar, mematuhi prinsip syariah. Fatwa dan panduan syariah digunakan untuk mengarahkan praktik perdagangan dan investasi, memastikan bahwa semua aktivitas pasar dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Program zakat dan infaq berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan mendukung masyarakat kurang mampu. Ini termasuk program bantuan langsung, pendidikan, dan dukungan usaha. Negara-negara ini seringkali mengimplementasikan program pelatihan dan pendidikan untuk memberdayakan individu dan meningkatkan kemampuan ekonomi mereka, yang pada gilirannya mendukung keseimbangan pasar. Regulasi harga untuk barang-barang pokok dan kebutuhan dasar diterapkan untuk memastikan bahwa harga tetap wajar dan terjangkau. Ini membantu mencegah praktik-praktik monopoli dan eksploitatif. Kontrol pasar dilakukan untuk mencegah penimbunan barang dan memastikan pasokan yang stabil. Ini juga termasuk pengawasan terhadap kualitas barang dan layanan untuk melindungi konsumen.

SIMPULAN DAN SARAN

Keseimbangan pasar dalam ekonomi Islam melibatkan integrasi prinsip-prinsip etika, moral, dan keadilan dalam penetapan harga dan distribusi barang. Ini memastikan bahwa pasar tidak hanya efisien tetapi juga adil dan transparan. Prinsip Etika: Nilai-nilai moral seperti keadilan (adl), kejujuran (sidq), dan tanggung jawab sosial memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan pasar. Praktik-praktik seperti larangan riba, penipuan, dan monopoli diatur untuk menghindari ketidakadilan ekonomi. Sementara ekonomi konvensional berfokus pada efisiensi dan optimasi sumber daya, ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral. Ekonomi Islam melibatkan pengawasan syariah untuk memastikan bahwa semua transaksi mematuhi prinsip-prinsip etika. Ini berbeda dari sistem konvensional yang lebih berfokus pada regulasi pasar dan kompetisi. ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang holistik terhadap keseimbangan pasar dengan mengintegrasikan prinsip etika, sosial, dan ekonomi. Ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai efisiensi ekonomi tetapi juga memastikan keadilan, transparansi, dan distribusi kekayaan yang merata. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam konteks sejarah dan modern menunjukkan keberhasilan pendekatan ekonomi Islam dalam menciptakan pasar yang adil dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2), 43–50. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.32694/010760>
- Argaheni, B. N. (2020). Sistemik Review: Dampak Perkuliahan Daring saat Pandemi Covid-19 terhadap Mahasiswa Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya: PLACENTUM*, 8(2), 99–108.
- Ariff, M., & Rosly, S. A. (2011). Islamic Banking in Malaysia: Uncharted Waters. *Asian Economic Policy Review*, 6(2), 301–319. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1748-3131.2011.01208.x>
- Chapra, M. U. (1992). *Islamic Economics: Theory and Practice*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

- Hafidzi, A., Sa'adah, S., & Luthfi, F. (2021). Telaah Obligasi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies)*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/cbjis.v3i1.708>
- Mahera, R. M., & Jamal, K. (2024). Penerapan Prinsip Keadilan Sosial dalam Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah: Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14586967>
- Miskiyah, Z., Zunaidi, A., Almustofa, S., & Suhardi, M. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–83. <https://doi.org/DOI:http://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>
- Nasution, Y. S. J. (2018). Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(III), 1–22. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.30821/ajei.v3i1.1695>
- Purnomo, A. (2015). Islam dan Konsep Welfare State dalam Ekonomi Islam. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.31602/iqt.v2i2.378>
- Siddiqi, M. N. (2004). *Islamic Banking and Finance: Theory and Practice*. Routledge.
- Wicaksono, J. W. (2019). Relevansi Model IS-LM Keseimbangan Pasar Barang dan Pasar Uang dalam Islam. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 3(2), 1–29.
- Zahratul Jannah, N., & Rahma Dwi, S. (2024). Mekanisme Transaksi E-Commerce Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Study Kasus Masyarakat Muslim Indonesia, Malaysia dan Singapura). *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(9). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11075710>